

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT II**

◀ **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi

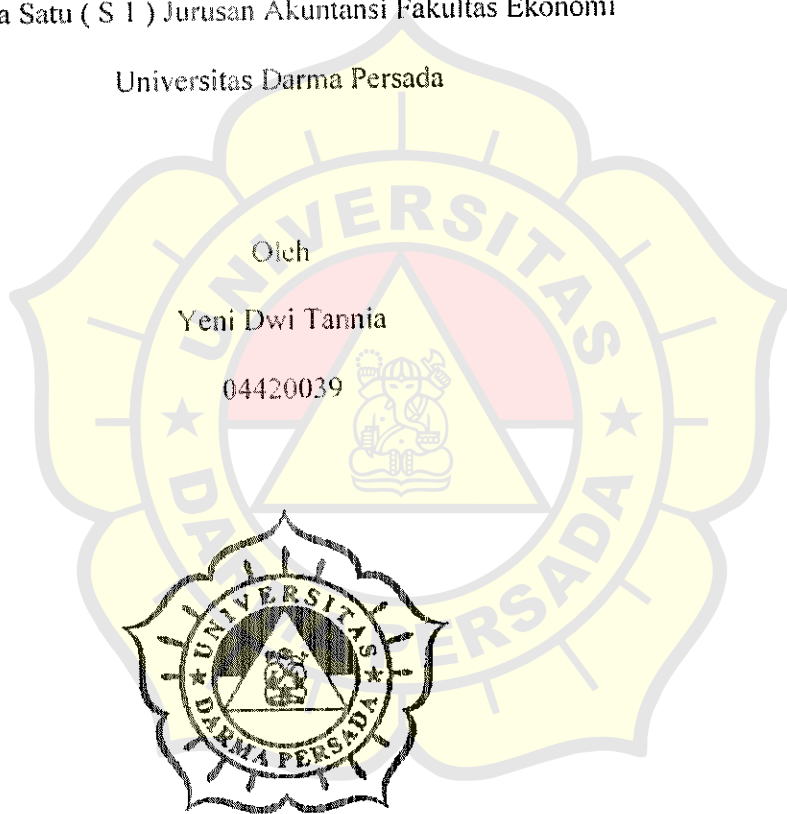
Strata Satu (S I) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Darma Persada

Oleh

Yeni Dwi Tannia

04420039



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2008



FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT II

Oleh :

Nama : Yeni Dwi Tannia

NIM : 04420039

Telah disetujui untuk diujikan.

Jakarta, Juli 2008

Mengetahui,

Kajur Akuntansi

Pembimbing Materi

(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)

(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)



FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT II**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Tim Penguji Skripsi pada :


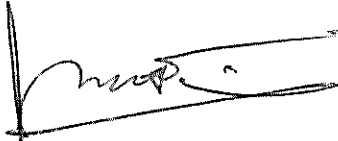
Tanggal : 04 Agustus 2008

Oleh :

Nama : Yeni Dwi Tannia

NIM : 04420039

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1 Drs. Boedi.S. Hartono, Ak,MM	Ketua	
2 Drs. Sunarto Widodo, Ak, MM	Anggota	
3 Drs. M. Iman Nugroho, Ak, MM	Anggota	

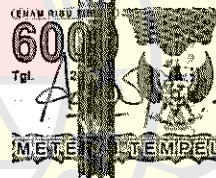
LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi yang berjudul : **KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT II** Merupakan karya ilmiah yang penulis susun dan dibuat sebaik-baiknya, dimana seluruh isi yang ada di dalam skripsi ini merupakan hasil karya tulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2008

Penulis



(Yeni Dwi Tannia)

ABSTRAK

- (A) Yeni Dwi Tannia
- (B) Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat II
- (C) xiii + 84 ; 2008
- (D) **Kata Kunci:** Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (E) **Alasan dan Tujuan Penelitian:** Untuk menganalisis sejauh mana dampak dari kontribusi penerimaan reklame terhadap PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II
- Metodologi Penelitian:** Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (dokumen). Data diperoleh melalui riset kepustakaan dan melalui riset lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi.
- Kesimpulan dan Saran:** Melalui data yang dianalisis, dapat dijelaskan bahwa rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap PAD selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan meskipun untuk tahun 2005 dan 2006 mengalami kenaikan. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis *ratio* vertikal, analisis *ratio* horizontal, dan analisis *trend*. Saran yang diberikan penulis adalah Suku Dinas Pendapatan daerah Jakarta Pusat II harus dapat meningkatkan pendapatan dari pajak reklame melalui cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi sehingga kenaikan PAD yang tinggi dapat diikuti oleh kenaikan pendapatan pajak reklame yang tinggi juga.
- (F) Daftar Acuan: 13 sumber
- (G) Dosen Pembimbing: Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Suku Dina Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat II.

Tujuan penulisan ini dibuat adalah sebagai syarat guna mendapatkan gelar Strata I jurusan Manajemen di Universitas Darma Persada Jakarta.

Dengan tersusunnya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, antara lain:

1. Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan materil, serta kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulis menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada dan pembimbing yang dengan sabar selalu memberikan semangat, masukan dan nasehat yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada yang telah memberikan ilmunya untuk saya dan teman-teman.
4. Ibu Yuspin selaku Kepala Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat II yang membantu penulis dalam penelitian dan yang telah memberikan kemudahan dalam pencarian data.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan (Teti, Puti, Minda, Dina, Sheila, dan Melly) yang selalu siap membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. SOFWAN sayanku yang selalu meluangkan waktu dan bersedia direpotin penulis. Mudah-mudahan pertemanan ini untuk kedepannya bisa lebih baik.
7. Teman-teman angkatan 2004 dan teman-temanku di dalam maupun di luar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis mengharapkan sumbang saran dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta , Juli 2008

(Yeni Dwi Tannia)

DAFTAR ISI

Surat Persetujuan	i
Surat Pengesahan	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Metodologi Penelitian.....	9
a. Sumber dan Jenis Data.....	9
b. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.7 Kerangka Pikir Penelitian.....	11
1.8 Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pajak.....15

- a. Pengertian Pajak.....15
- b. Fungsi Pajak.....17
- c. Syarat Pemungutan Pajak.....19
- d. Asas Pengenaan Pajak.....21
- e. Sistem Pengenaan Pajak.....24
- f. Hukum Pajak Formal dan Materil.....26
- g. Jenis Pajak.....27

2.2 Pendapatan Asli Daerah28

2.3 Pajak Daerah.....29

- a. Pengertian Pajak Daerah.....29
- b. Efisiensi dan Efektifitas Pajak Daerah.....31
- c. Sanksi Pajak Daerah.....34
- d. Perkembangan Pajak Daerah.....36

2.4 Pajak Reklame.....39

- a. Objek dan Subjek Pajak Reklame.....42
- b. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame.....43

2.5 Analisis Ratio.....45

**BAB III SEJARAH dan GAMBARAN UMUM SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH
JAKARTA PUSAT II**

3.1 Sejarah.....47

3.2 Struktur Organisasi.....49

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....51

 a. Tugas Pokok.....51

 b. Fungsi.....52

3.4 Rencana Penerimaan.....53

3.5 Sasaran dan Capaian Visi dan Misi.....53

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dengan Menggunakan *Official Assessment System*..56

4.2 Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Reklame.....66

 a. Pelaksanaan Pencairan Tunggakan Pajak Reklame.....67

 b. Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak Bagi Wajib Pajak dan Aparat Pajak.....68

 c. Pelaksanaan Penertiban Reklame Bermasalah Ukuran 24 m² Ke bawah.....69

 d. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame.....70

 e. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Suku Dinas Pendapatan
 Daerah Jakarta Pusat II.....71

4.3 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....82

5.2 Saran.....83

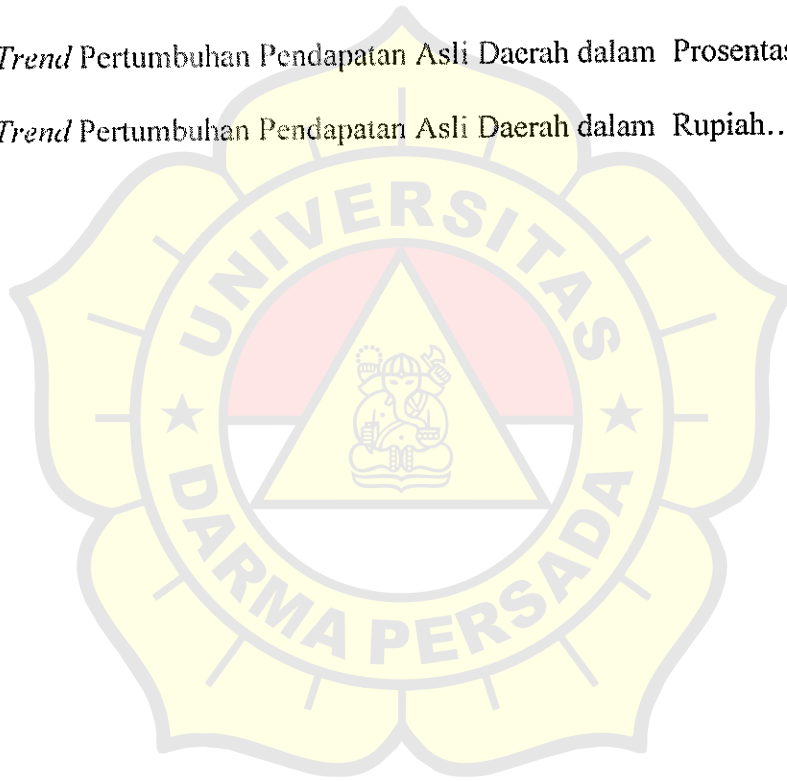
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



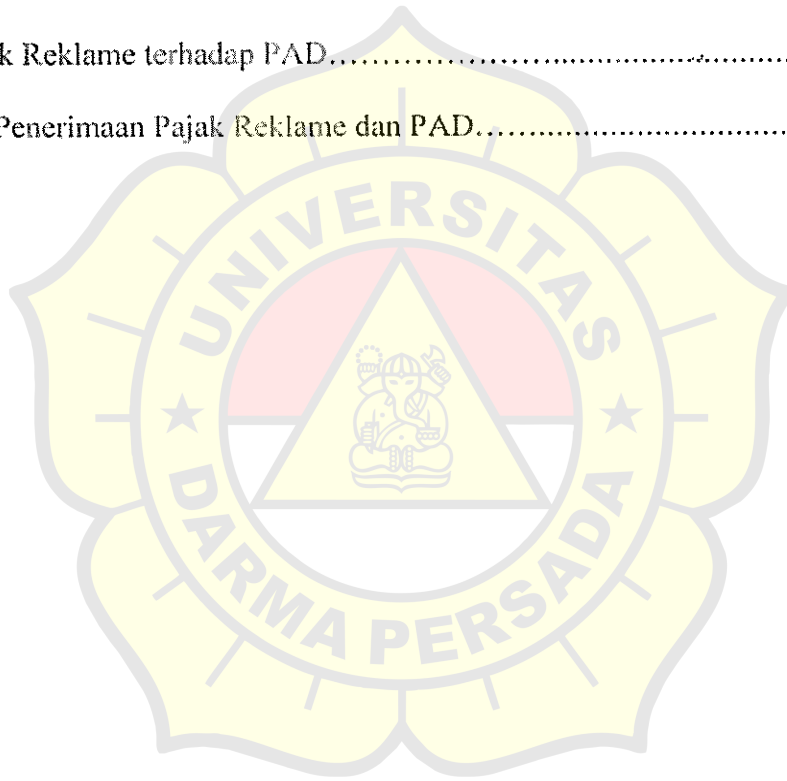
DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Kerangka Pikir Penelitian.....	13
Gambar II	Struktur Organisasi.....	49
Gambar III	Grafik <i>Trend</i> Pertumbuhan Pajak Reklame dalam Prosentase.....	63
Gambar IV	Grafik <i>Trend</i> Pertumbuhan Pajak Reklame dalam Rupiah.....	64
Gambar V	Grafik <i>Trend</i> Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam Prosentase..	79
Gambar VI	Grafik <i>Trend</i> Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam Rupiah.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel I	Tarif Reklame Papan/ billboard/videotron/ <i>large electronic display</i> (LED) dan kain.....	43
Tabel II	Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame.....	57
Tabel III	Rasio Vertikal Penerimaan Pajak Reklame.....	60
Tabel IV	Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD.....	55
Tabel V	Rasio Vertikal Penerimaan Pajak Reklame dan PAD.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa

sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. PAD sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Jakarta Pusat merupakan bagian dari Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Jakarta Pusat sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan PAD berasal dari pengolahan sumber

daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Jakarta Pusat berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah Jakarta Pusat dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen PAD. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Jakarta Pusat dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas delapan jenis Pajak Daerah (Dispenda Jakarta Pusat II), antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Parkir, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Untuk dapat memungut pajak tersebut pemerintah menggunakan sistem pemungutan melalui *official assessment sistem dan self assessment system*. Sistem pemungutan ini dilakukan melalui dua cara yaitu surat ketetapan pajak dan retribusi.

Tarif pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebesar 25%. Objek pajak reklame menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2004 adalah:

- a. Reklame papan/billboard/megatron/videotron/large electronic display (LED)
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat (stiker)
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara

- g. Reklame suara
- h. Reklame film/slide
- i. Reklame peragaan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II”**



1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi pelaksanaan pemungutan pajak reklame dengan menggunakan *official assessment system*?
2. Bagaimana peranan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan dari pajak reklame?
3. Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan PAD?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka peneliti membatasi masalah tersebut hanya pada masalah pengaruh pajak reklame terhadap PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II dalam kurun waktu 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dapat di rumuskan menjadi:

1. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak reklame sudah efisiensi dengan menggunakan *system official assessment*?

2. Apakah pemerintah sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan dari pajak reklame?
3. Apakah pajak reklame dapat mempengaruhi PAD?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana dampak dari kontribusi penerimaan reklame terhadap PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II
2. Untuk menilai seberapa erat hubungan antara pajak reklame dengan PAD
3. Untuk menganalisis laju pertumbuhan dan realisasi penerimaan pajak reklame di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka hasilnya akan berguna sebagai:

1. Tambahan referensi ilmiah mengenai pajak reklame
2. Salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah terhadap pajak reklame
3. Bagi peneliti sendiri sekiranya dapat meningkatkan pengetahuan, menambah pengalaman dan wawasan penelitian dimasyarakat khususnya bidang pajak reklame.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis ratio yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang memberikan gambaran mengenai suatu objek penelitian. Metode ini diwujudkan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan.

1. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data tersebut mencakup: data penerimaan pajak reklame dan data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Pusat II yang dapat dilihat dari laporan keuangan per periode, yakni laporan selama 5 tahun, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Penelitian Lapangan

1) Wawancara

Merupakan teknik penelitian dimana peneliti mengadakan komunikasi langsung dengan pejabat yang berwenang, meminta dan mempelajari dokumen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Observasi

Merupakan tehnik penelitian dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dari informasi yang diperoleh, penulis dapat membuat analisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek-objek yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Tehnik ini dilaksanakan dengan maksud untuk data-data pendukung yang berfungsi sebagai landasan teori guna mendukung data-data primer yang diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi yang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Analisis Data

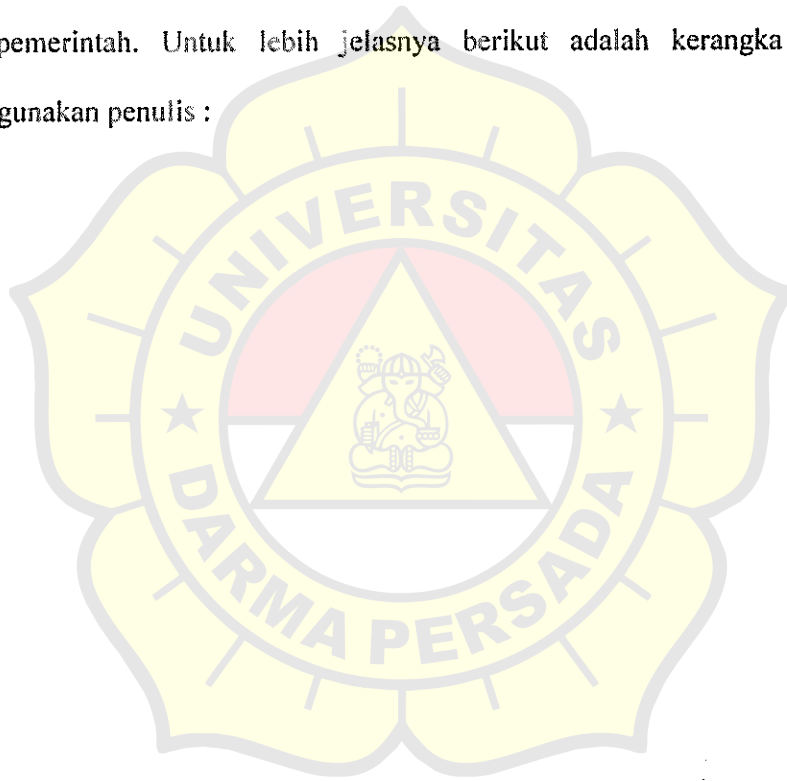
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis ratio vertikal yaitu membandingkan pajak reklame terhadap total PAD, ratio horizontal yaitu membandingkan pajak reklame dari tahun ke tahun dan perbandingan pajak reklame antara rencana dan realisasi terakhir data dianalisa menggunakan analisa trend. Dikarenakan penelitian ini berusaha untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka metode yang digunakan adalah mengacu pada metode asosiatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.

1.7 Kerangka Penelitian

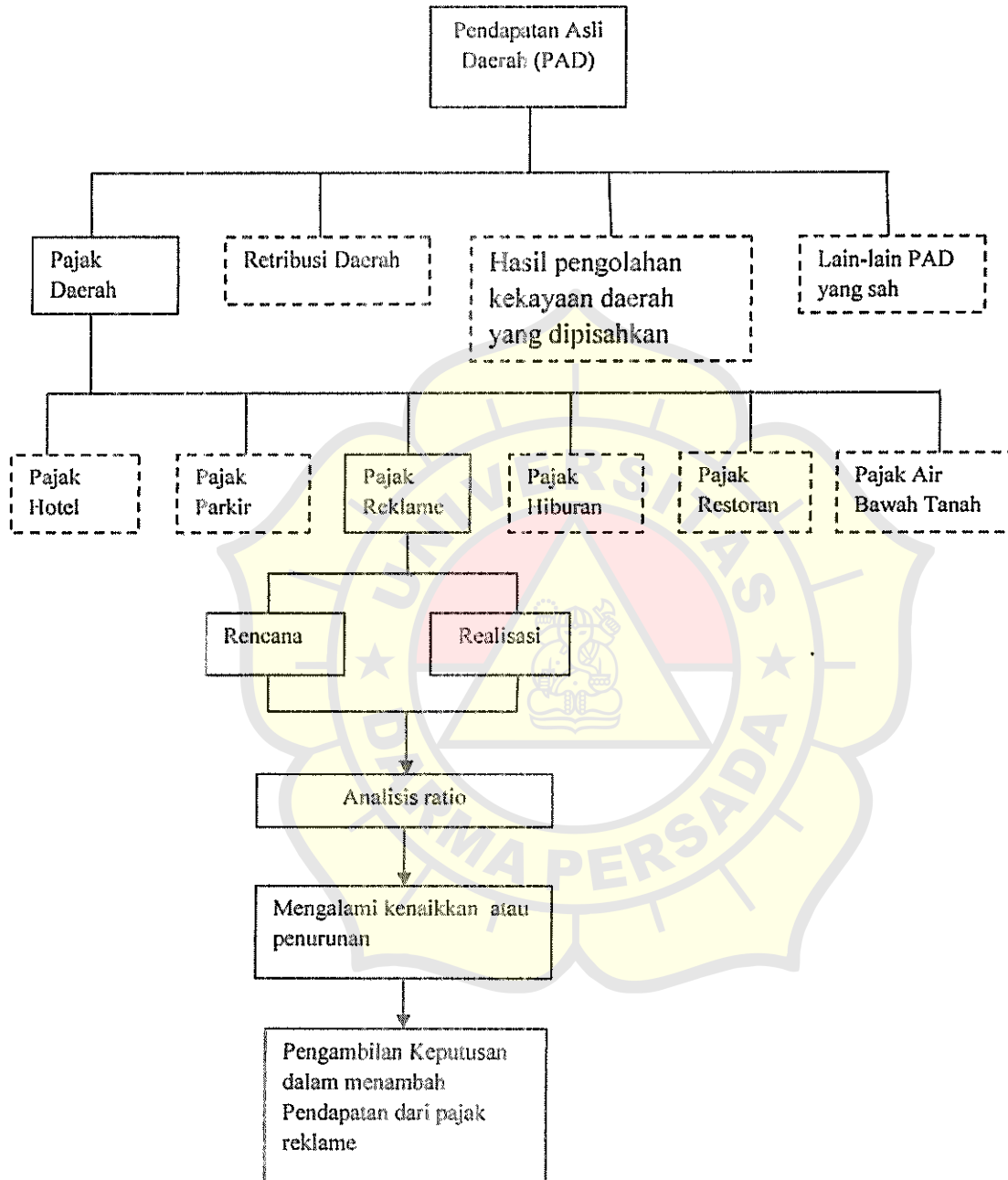
Kerangka penelitian ini dibuat untuk dapat memperjelas secara deskriptif naratif yang menggambarkan keterkaitan konsep-konsep kunci, yang secara integral “potret” (manifestasi) dari fokus permasalahan. Dengan diundangkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Pertimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain penerimaan yang sah. Konsekuensi yang dihadapi oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Hal ini disebabkan Propinsi DKI Jakarta tidak memiliki sumberdaya alam sehingga perolehan dana perimbangannya relative kecil, sehingga harus meningkatkan sumber potensi keuangan adalah pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selanjutnya, pada masa UU No 18 Tahun 1997 Pajak daerah dibedakan menjadi dua golongan yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Pajak daerah tingkat II meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Bawah Tanah

(PABT). Dan yang akan dibahas oleh penulis Pajak Reklame. Reklame sendiri adalah “Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya berikut adalah kerangka penelitian yang digunakan penulis :



Gambar Kerangka Penelitian



Sumber Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang diolah oleh penulis

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan landasan teori mengenai pajak, pajak daerah, pajak reklame dan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Sejarah dan Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisikan sejarah dan gambaran umum perusahaan yang akan diteliti penulis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak reklame terhadap PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II dari penulis mengenai hubungan tersebut.